PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kompas Hari: Rabu Tanggal: 10 September 2008 Halaman: 6

SEREMONIA

Walikota Yogyakarta Tampil Sebagai Pembicara pada Berlin Summer Dialogue 2008

WALIKOTA Yogyakarta H Herry Zudianto berangkat ke Jerman untuk menghadiri Berlin Summer Dialogue 2008, memenuhi undangan dari Pemerintah Republik Federal Jerman terkait pelaksanaan kerjasama antara Depdagri RI cq Ditjen Bina Bangda dengan Pemerintah Republik Federal Jerman cq Deutsche Gesellschaft für Technissche Zusammenarbeil (GTZ). Selain DIY, turut diundang pula provinsi dan kabupaten yang bekerjasama dengan GTZ diantaranya Provinsi Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Dari 17 kepala daerah yang diundang oleh Pemerintah Republik Federal Jerman, dua kepala daerah ditunjuk mewakili Indonesia sebagai pembicara pada Berlin Summer Dialogue 2008 yang berlangsung di Berlin Town Hall, Kamis (4/9), yaitu Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto, dan Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal. Herry Zudianto menyampaikan makalah tentang migrasi, urbanisasi, dan pembangunan, *review* dan strategi pemerintahan perkotaan, berjudul "The Growth of Urbanization in the City of Yogyakarta, Political Management and Economic Development Alternative: Urbanization, Problem, and Solution". Seminar diikuti oleh peserta dari unsur pemerintah, konsultan, dan NGO, dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Dalam kesempatan ini, Herry Zudianto mengajak seluruh *stake holder* agar jangan larut dalam globalisasi. "Kita jangan larut dalam globalisasi yang salah satu dampaknya mematikan usaha kecil, di lain pihak memperbesar pemilik modal. Yang diperlukan adalah ekonomi berkeadilan yang tak hanya mementingkan pertumbuhan, tapi juga pemerataan," ungkap Herry Zudianto. Kota Yogyakarta seluas 3,25 Ha, berpredikat sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota tujuan wisata, dan kota perjuangan sekaligus pusat pemerintahan Provinsi DIY, pelayanan jasa, dan perdagangan serta simpul transportasi Jawa bagian selatan. Dengan predikat dan fungsi tersebut, lokomotif utama perekonomian Kota Yogyakarta adalah pariwisata dan pendidikan. Fenomena urbanisasi pun tak bisa dihindarkan di Kota Yogyakarta, sehingga dilakukan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas, kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaan kota dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan memperkuat jalinan kerjasama pada tingkat regional. Kebijakan didukung pula dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Praktik transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dikomunikasikan kepada masyarakat lewat berbagai media. Setiap rancangan peraturan daerah yang berdampak pada masyarakat dipublikasikan secara terbuka. Seminggu dua kali, walikota berdialog dengan warga melalui radio. Lebih lanjut, makalah pun menyinggung program dan kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif urbanisasi di Kota Yogyakarta.

CRL

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005